



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA SOLOK
(Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 dan UU PPh No. 26 Tahun
2008)**

SKRIPSI



**FITRIANI
06153129**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

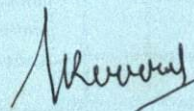
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Akuntansi dan Pembimbing Skripsi, menyatakan bahwa skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama : Fitriani
No. BP : 06 153 129
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Solok (Menurut UU KUP no.28 tahun 2007 dan UU PPh no.36 tahun 2008)

Telah diseminarkan pada tanggal 29 Juli 2010 dan telah disetujui sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pembimbing



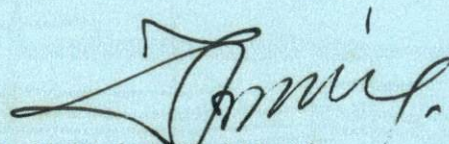
Drs. Aries Tanno, M.Si, Ak
NIP. 196904091994031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP. 195410091980121001



Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 196009111986031001

3. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sekaligus pembimbing akademik penulis.
4. Bapak Drs.Aries Tanno,M.Si,AK sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih banyak atas kesabaran dan kemudahan yang Bapak berikan selama penulisan skripsi ini.
5. Pihak Biro Jurusan Akuntansi, Da Ari, Mama Loly, Ni Eva yang telah memberikan banyak bantuan dalam kelancaran urusan administrasi akademis penulis.
6. Terimakasih banyak untuk Moeloek big family, none, om, ibu, ayah, uncu, ante, ma2 tola, uni inda, cikudo, cikudi, dori, nemen, nina dan semua yamh telah memberikan energy untuk bangkit dan tetap semangat menjalani semua ini.
7. Kepada Eka Febriyanti dan keluarga yang sudah bersedia menampung penulis di rumahnya selama proses pengumpulan data dan bersedia menemani penjelajahan penulis di kota Solok. Thanks so much.
8. Terimakasih kepada teman-teman ku Ida, Vi2, Hesty, Tya, Chika, Fauziah, Dilla, Daniela, Reno dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak mungkin namanya disebutkan satu persatu. Buat bg Osra David, abang sepayung, terima kasih banyak atas bantuannya selama ini.
9. Spesial penulis ucapkan untuk seseorang yang di hati sampai saat ini, inisial NAW. Terima kasih atas cintamu, dukunganmu slama ini, baik dalam suka dan dukaku.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan terbuka menyambut setiap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, demi penyempurnaan di masa datang. Semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca.

Padang, 20 Oktober 2010

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan	10
2.1.1 Definisi Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	12
2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	13
2.2.1 Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum	13
2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	14
2.2.2.1 Cara Memperoleh NPWP	14
2.2.2.2 Wajib Pajak yang Wajib Mendaftar dan Mendapatkan NPWP.....	16
2.2.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	16
2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)	17
2.2.3.1 Jenis-jenis SPT	17
2.2.3.2 Batas Waktu Penyampaian SPT	18
2.2.4 Surat Setoran Pajak.....	19

2.2.4.1	Fungsi SSP	19
2.2.4.2	Tempat Pembayaran Pajak	19
2.2.4.3	Batas Waktu Pembayaran Pajak.....	19
2.3	Pajak Penghasilan.....	22
2.3.1	Subjek Pajak	22
2.3.1.1	Subjek Pajak Dalam Negeri	22
2.3.1.2	Subjek Pajak Luar Negeri	23
2.3.1.3	Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak	24
2.3.2	Objek Pajak	25
2.4	Pajak Penghasilan Pasal 21	26
2.4.1	Subjek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya	26
2.4.1.1	Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	26
2.4.1.2	Penerima Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21	27
2.4.2	Objek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya	27
2.4.2.1	Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	27
2.4.2.2	Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21	29
2.4.3	Yang Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21	30
2.4.3.1	Pemotong PPh Pasal 21	30
2.4.3.2	Yang Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21	31
2.4.4	Tarif Pajak Penghasilan	31
2.4.5	Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak	32
2.4.5.1	Wajib Pajak Badan	32
2.4.5.2	Wajib Pajak Orang Pribadi	32
2.5	Pajak Penghasilan Pasal 22	33
2.5.1	Pemungut dan Objek PPh Pasal 22.....	33
2.5.2	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	34
2.5.3	Pengecualian PPh Pasal 22	36
2.5.4	Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22	37
2.6	Pajak Penghasilan Pasal 23	39
2.6.1	Pemotong PPh Pasal 23	39

2.6.2	Tarif PPh Pasal 23	40
2.6.3	Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	41
2.7	Pajak Penghasilan Pasal 25	41
2.7.1	Pengertian PPh Pasal 25	41
2.7.2	Penghitungan PPh Pasal 25	42
2.7.3	PPh Pasal 25 Sebelum Penyampaian SPT	42
2.8	Pengertian dan Bahasan Kepatuhan dalam Perpajakan	43
2.9	Tinjauan Penelitian Terdahulu	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Populasi	47
3.2	Sampel dan Teknik Pengambilannya	47
3.3	Identifikasi dan Pengukuran Variabel	48
3.4	Metode Pengumpulan Data	49
3.5	Uji Validitas dan Reliabilitas	51
3.5.1	Uji Validitas	51
3.5.2	Uji Reliabilitas.....	56
3.6	Teknik Analisa Data	57

BAB IV ANALISA DATA

4.1	Proses Pengumpulan Data	58
4.2	Demografi Responden	59
4.3	Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi	61
4.4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT tahunan PPh Orang pribadi	65

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	67
5.2	Implikasi Hasil Penelitian	69
5.3	Keterbatasan Penelitian Dan Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	x
-----------------------------	----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas Waktu Pembayaran Masa untuk Setiap Jenis Pajak	20
Tabel 2.2 Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	31
Tabel 2.3 Tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi oleh Pertamina dan badan usaha lainnya	35
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner.....	58
Tabel 4.2 Demografi Responden Wajib Pajak PPh OP	59
Tabel 4.3 Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi ...	62
Table 4.4 Persentase Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi	63
Table 4.5 Persentase kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan. Dalam nota keuangan 2010, pada tahun 2005 penerimaan APBN mencapai Rp347 triliun, tahun 2006 menjadi Rp409 triliun, tahun 2007 sebesar Rp491 triliun, tahun 2008 meningkat menjadi Rp658 triliun. Untuk tahun 2010 target Penerimaan Perpajakan sebesar Rp742,7 triliun (12,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto) yang berarti meningkat Rp90,8 triliun atau 13,9 persen dari APBN-P tahun 2009.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Tulang punggung dari sistem ini adalah *voluntary compliance* dari masyarakat, tinggi rendahnya *compliance* masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada giliran berikutnya berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan negara.

Sejak reformasi perpajakan, kinerja penerimaan pajak secara umum meningkat secara konsisten. Yang menjadi pertanyaannya apakah keberhasilan ini merupakan indikasi dari suksesnya penerapan sistem *self assessment* yang mengandalkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ataukah faktor lain. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rochmat Soemitro bahwa keberhasilan sistem *self assessment* akan ditentukan oleh (i) kesadaran pajak dari wajib pajak, (ii) kejujuran wajib pajak, (iii) *tax mindedness* yaitu hasrat untuk membayar pajak dan (iv) *tax discipline*.

Menurut pendapat ini bahwa bertambahnya jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tingginya kesadaran hukum masyarakat. Lebih spesifik lagi dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu dengan adanya proporsi yang tepat antara pajak dengan pendapatan Wajib Pajak dapat meningkatkan jumlah pembayar pajak. Jika peningkatan penerimaan pajak ini disebabkan oleh kian membaiknya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, maka reformasi perpajakan itu sungguh-sungguh berhasil dan sejalan dengan konsep yang dicanangkan. Namun jika peningkatan itu disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait dengan persoalan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman yang cukup Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan maka keberhasilan itu akan sulit dicapai pada masa-masa selanjutnya.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan perekonomian dan ilmu pengetahuan suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan maupun orang pribadi untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara

menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban pajak. Maka dari itu pemerintah melakukan berbagai cara dengan mengeluarkan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku juga harus disesuaikan dan dikembangkan supaya dapat diterapkan.

Kassipilai (dalam Mohd. Rizal Palil ; 2005) menyatakan bahwa “ tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hukum pajak menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak (*tax attitude*) dalam *self assessment system*”. Sehingga penting bagi kita untuk membahas masalah tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak karena nantinya data dan informasi mengenai tingkat pemahaman wajib pajak pada suatu wilayah atau negara, akan sangat berguna bagi pihak pemerintah (fiskus) negara tersebut sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan perpajakannya. Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Contohnya jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah (Spicer dan Lundsent, 1976).

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh harian kompas, sebanyak 66,7 persen responden menilai tidak memadainya pemberian informasi dan pengenalan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pajak kepada masyarakat selama ini. Sedangkan untuk prosedur perhitungan beban pajak sebanyak 53,5 persen responden menyatakan tidak mengetahui sama sekali perhitungan pajak yang dibebankan kepadanya. Dari pendapat di atas bisa

tergambar dengan jelas betapa minimnya pengetahuan masyarakat akan pajak. (Satrio, 2005)

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban perpajakan, juga banyak yang masih berada pada grey area (daerah abu-abu). Artinya, memang dibutuhkan pemahaman khusus dan penalaran yang baik dari masyarakat untuk bias memahami aturan yang berlaku tersebut. Belum lagi perbedaan cara menginterpretasikan suatu hal dari masyarakat yang sudah pasti tidak sama akan menyebabkan pemahaman yang berbeda pula. Pemberlakuan peraturan penunjang seperti Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga tidak disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya hanya segelintir orang yang selalu meng-update pengetahuannya yang mengetahui telah terjadi perubahan peraturan perpajakan.

Ketidakhahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadikan wajib pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Pemerintah menetapkan mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun pegawai swasta yang penghasilannya diatas PTKP diwajibkan memiliki NPWP. Hal tersebut, secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Astuti (2007) menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di wilayah kota Padang tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan tingkat pemahaman sebesar 62,66%. Namun dalam penelitian tersebut memiliki keterbatasan dari sisi sampel yang masih sedikit, yaitu hanya 32 wajib pajak PPh

orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di kota Padang. Selain itu aturan perpajakan yang berlaku juga masih peraturan lama yaitu UU No.17 tahun 2000.

Penelitian lain yaitu Tri Rezeki Putra (2009) tentang analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di Kota Solok, dengan cara mengambil sampel sebanyak 42 responden yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman wajib pajak PPh dikota Solok sebesar 69,31%, ini berarti bahwa wajib pajak PPh paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Akan tetapi penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan UU perpajakan yang lama.

Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan sampel berbeda serta tahun yang berbeda pula. Penulis memilih sampel dari beberapa populasi yang telah memiliki NPWP dan memiliki penghasilan diatas PTKP di kota Solok. Pada saat penulis melakukan penelitian peraturan perpajakan yang berlaku adalah UU No.28 tentang KUP dan UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dipilihnya kota Solok sebagai populasi adalah Kota Solok merupakan Kota Perdagangan dan salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Sumatera Barat berada di kota ini. Sektor perdagangan dan pertanian telah mampu membuat daerah tersebut mampu mengembangkan perekonomiannya (Padang Today, 30 Mei 2009). Selain itu, penulis menduga adanya kemungkinan pendapatan negara

yang tidak disetorkan dengan seharusnya karena beberapa hal seperti WP yang belum memiliki NPWP serta tidak menyetorkan PPh terutang dan SPT.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, penulis mencoba untuk mengukur seberapa besar pengaruh pemahaman ketentuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya dalam hal Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat peneliti melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI di kota SOLOK (Menurut UU KUP no.28 tahun 2007 dan UU PPh no.36 tahun 2008)”**

1.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan “Bagaimana pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kota Solok ?”, yang didalamnya mencakup Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini dalam lingkup berikut:

- a. Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman WP OP terhadap peraturan perpajakan UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP dan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) .

- b. Dan hanya melihat sekilas kepatuhan WP OP terhadap kepatuhannya dalam pelaksanaan perpajakan dengan melihat kapan WP OP memiliki NPWP dan sudah berapa kali menyampaikan SPT dalam 5 tahun terakhir.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat Kota Solok sudah memahami pelaksanaan kewajiban perpajakan yang didasari oleh UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan menerapkannya dalam memenuhi kewajibannya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan bagi pengembangan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Perpajakan, dapat memberikan bukti empiris tentang pemahaman masyarakat kota Solok terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Bagi Instansi yang terkait diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman masyarakat kota Solok terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3. Bagi penelitian berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.
4. Bagi penulis bahwa dengan melakukan penelitian ini penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis, maka laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

- Bab I Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi .
- Bab II Merupakan landasan teori yang berisi tentang landasan teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini .
- Bab III Membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Pembahasannya mencakup populasi dan sampel, identifikasi dan pengukuran variable, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, serta diakhiri dengan teknik analisa data.
- Bab IV Membahas Hasil Penelitian dan Analisis yang berisi hasil-hasil yang didapatkan dalam penelitian, di mana peneliti akan memaparkan secara detail dan akan menjelaskan temuan-temuan baru yang ada serta analisis dan pembahasan .

Bab V Merupakan penutup, di mana dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan/ kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta implikasinya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro (Muyassaroh, 2010:1) definisi pajak yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, pembayaran pajak tidak akan mendapatkan kontraprestasi atas pajak yang telah dibayarkan, pajak terdgunakan oleh Negara untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum”.

Sedangkan definisi pajak Menurut S.I Djajadiningrat (Tjahjono dan Husein, 2005:2) adalah:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan pada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang dfitetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesesaheraan umum”.

Dari definisi – definisi tersebut di atas, dapat dilihat bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pembayaran iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah pemerintah dari wajib pajak berupa uang.
2. Dalam pemungutan pajak harus berdasarkan kekuatan peraturan atau undang-undang.
3. Dapat dipaksa, yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah.
4. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas (Boediono 1996: 11-15).

2.1.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu pajak sebagai fungsi mengatur (Tjahjono dan Husein, 2005:3).

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang

keuangan. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah maksudnya untuk mengurangi gaya hidup mewah.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak terdiri dari:

- 1) *Official Assessment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- 2) *Semi Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- 3) *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
- 4) *Withholding System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang (Muyassaroh,2010:5).

2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2.2.1 Pengertian-Pengertian dalam Ketentuan Umum

Beberapa istilah dalam perpajakan di Indonesia sesuai Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseoan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

4. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
5. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak
6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
9. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
10. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

11. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Sesuai

Undang-Undang RI No.28 Tahun 2007 tentang KUP adalah

“NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajaknyang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

2.2.2.1 Cara Memperoleh NPWP

Bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan di atas PTKP dan Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, hal ini sesuai dengan UU KUP No. 28/2007 yang memuat tentang sanksi-sanksi bagi WP yang sengaja tidak mendaftarkan diri dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Wajib Pajak datang sendiri ke Kantor Direktorat Jendral Pajak di wilayah tempat tinggal wajib pajak, sekaligus melampirkan kelengkapannya dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, termasuk wanita kawin yang melakukan pisah harta. Selain itu, Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri melalui internet dengan cara *e-Registration*, kemudian menukar Surat Keterangan

(SKT) sementara yang telah dicetak dengan kartu NPWP dan SKT yang asli (Muyassaroh, 2010:21).

2.2.2.2 Wajib Pajak yang Wajib Mendaftar dan Mendapatkan NPWP

Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang meliputi:

1. Badan
2. Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan netto di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (Boediono, 1996: 28).

2.2.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diubah menjadi sebagai berikut:

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan

- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan, sesuai Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.3.1 Jenis-jenis SPT

1. SPT – Masa

SPT Masa merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang (UU KUP pasal 1 huruf 7 tahun 2007). Singkatnya, SPT pajak yang harus dilaporkan ke KPP setiap bulan.

2. SPT – Tahunan

SPT Tahunan merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak (Muyassaroh,2010:37).

2.2.3.2 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT adalah:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak., kecuali batas waktu penyampaian SPT – Masa PPh pasal 22 Bendaharawan dan Bea Cukai yaitu 14 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak (Muyassaroh,2010:43-44)

Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:

1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani.
2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan.
3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah tiga tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau

4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak (Muyassaroh,2010:45).

2.2.4 Surat Setoran Pajak

Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2.4.1 Fungsi SSP

Fungsi SSP adalah:

1. Sebagai sarana atau media yang digunakan untuk membayar pajak.
2. Sebagai bukti pembayaran pajak (Resmi, 2008:57)

2.2.4.2 Tempat Pembayaran Pajak

Pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan di:

1. Kantor Pos atau
2. Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2.4.3 Batas Waktu Pembayaran Pajak

Batas waktu pembayaran pajak dapat dikelompokkan menjadi pembayaran masa, pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan dan pembayaran pajak karena terbitnya surat ketetapan atau surat keputusan.

1. Pembayaran Masa

Pembayaran masa adalah pembayaran yang dilakukan pada setiap masa pajak. Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tabel 2.1

Batas Waktu Pembayaran Masa untuk Setiap Jenis Pajak

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran
1.	PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2.	PPh Pasal 22 – Bendaharawan	Pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara, dengan SSP yang diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan.
3.	PPh Pasal 22 - Bea Cukai	Harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan.
4.	PPh Pasal 22 - yang dipungut Pertamina	Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum penebusan <i>Delivery Order</i> (DO).

5.	PPH Pasal 22 - Badan Tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6.	PPH Pasal 22 yang dipungut bendahara	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.
7.	PPH Pasal 23	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
8.	PPH Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sumber: Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008 dalam Yolina

(2009:13)

2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan

Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

3. Pembayaran karena terbitnya Surat Ketetapan atau Surat Keputusan

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Suparmono, 2005:110).

2.3 Pajak Penghasilan Umum

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang diajukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak untuk membiayai pengeluaran Negara (Resmi, 2008:71).

2.3.1 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak. Undang-undang PPh di Indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri (Muyassaroh,2010:24).

2.3.1.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Berdasarkan pasal 2 ayat (3) UU PPh No. 36 Tahun 2008, pihak yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun

pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2.3.1.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Berdasarkan pasal 2 ayat (4) UU PPh No. 36 Tahun 2008, pihak yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.1.3 Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, pihak yang tidak termasuk dengan Subjek Pajak luar negeri adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak

menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.2 Objek Pajak

Pihak yang menjadi Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan sumber mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, Penghasilan yang menjadi objek PPh dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta.

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak bisa masuk dalam tiga kelompok di atas (Muyassaroh,2010:27).

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaannya. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan (Resmi, 2008:93).

2.4.1 Subjek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya

2.4.1.1 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Pegawai tetap.
2. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM (*direct selling*) dan kegiatan sejenis.
3. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
4. Penerima honorarium.

5. Penerima upah.
6. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) (Resmi, 2008:94).

2.4.1.2 Penerima Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh

Pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia (Resmi, 2008:97).

2.4.2 Objek PPh Pasal 21 dan Pengecualiannya

2.4.2.1 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti

rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya (Resmi, 2008:98).

2.4.2.2 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri

Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah (Resmi, 2008:99).

2.4.3 Pemotong PPh Pasal 21 dan pengecualiannya

2.4.3.1 Pemotong PPh Pasal 21

Pengenaan PPh pasal 21 bersifat pemotongan. Pemotongan yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau upah yang diterima tidak lagi utuh tetapi sudah dipotong dengan PPh pasal 21. Pemotong pajak untuk PPh pasal 21, yang biasa disebut sebagai pemotong pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah
3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
4. Perusahaan dan bentuk usaha tetap.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang

telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

6. Penyelenggara kegiatan (Resmi, 2008:100).

2.4.3.2 Yang Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21

Sedangkan yang tidak termasuk pemotong pajak yang memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 adalah:

1. Badan perwakilan Negara asing.
2. Organisasi internasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.

2.4.4 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif PPh yang berlaku menurut pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Yang mulai berlaku 1 januari 2009

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.2 Tarif Pajak

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	35%

Sumber: Susunan dalam Satu Naskah dan Undang-Undang

Perpajakan

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT)

Tarif pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2.4.5 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya PPh, terlebih dahulu harus ditentukan PKP-nya karena PKP inilah yang akan dikalikan dengan tarif pajak untuk menentukan besarnya pajak penghasilan.

2.4.5.1 Wajib Pajak Badan

Menghitung PKP untuk wajib pajak badan dengan cara mengurangi penghasilan yang merupakan objek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan undang-undang.

2.4.5.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Untuk wajib pajak pribadi, penghasilan bruto selain dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan undang-undang, dikurangi juga dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan sebagai Objek Pajak} - \text{Biaya} - \text{PTKP}$$

Tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP adalah 20% lebih besar daripada wajib pajak yang mempunyai NPWP.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan oleh badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi, 2008:107).

2.5.1 Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang;
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD)
4. Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;

5. Industri semen, industri rokok putih, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, atas penjualan hasil produksinya.
7. Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Paja, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul (www.pajak.go.id).

2.5.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

1. Atas impor:
 - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) sebesar 2,5% dari nilai impor;
 - b. Yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor;
 - c. Yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
5. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian dan tidak final.
6. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

- Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
- Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
- Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
- Rokok = 0.15% x Harga Bandrol (Final)
- Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

7. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas, yang dapat dilihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Tarif PPh 22 atas penjualan hasil produksi
oleh Pertamina dan badan usaha lainnya**

Jenis Bahan Bakar	SPBI Swastanisasi (%dari penjualan)	SPBU Pertamina (%dari penjualan)
Premiun	0,3	0,25
Solar	0,3	0,25
Premix/SuperTT	0,3	0,25
Minyak Tanah		0,3
Gas LPG		0,3

Sumber: [www.pajak .go.id](http://www.pajak.go.id)

Catatan: *Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur /dealer/agen,bersifat final.*

8. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN (www.pajak .go.id).

2.5.3 Pengecualian PPh Pasal 22

Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).
2. Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh DJBC.
3. Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali, dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
4. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.
6. Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.
8. Impor kembali (*re-impor*) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog (www.pajak.go.id).

2.5.4 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh

Pasal 22

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 22 sesuai dengan pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
2. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang.

Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu:

- lembar pertama untuk pembeli;
- lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
- lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke KP2KP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

3. PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KP2KP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KP2KP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
5. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (*delivery order*) ditebus dengan menggunakan SSP.

Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh 22 rangkap 3 yaitu:

- Lembar pertama untuk pembeli;
- Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada KP2KP;
- Lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir (www.pajak.go.id).

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Resmi, 2008:110).

2.6.1 Pemotong PPh Pasal 23

Adapun yang menjadi subjek pajak adalah penerima dari penghasilan, terdiri dari wajib pajak dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap). Sifat dari PPh pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenal PPh pasal 23 dipotong terlebih dahulu PPh pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong PPh pasal 23 terdiri dari: badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu.

Yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 adalah para tenaga ahli, seperti; akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas dan orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran berupa sewa (Resmi, 2008:111).

2.6.2 Tarif PPh Pasal 23

Besarnya tarif PPh Pasal 23 ada dua yaitu 15% dan 2%. Dalam ketentuan baru Undang-undang Pajak Penghasilan, struktur tarif PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Tarif 15% x penghasilan bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan dan bonus selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.
2. Tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan.
 - imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan.

Pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 23 bagi Wajib Pajak dalam negeri yang tidak mempunyai NPWP dikenakan 100% lebih besar dari pada Wajib Pajak yang mempunyai NPWP (pajaktaxes.blogspot.com).

2.6.3 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

1. Saat terutang

PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

2. Penyetoran

PPh pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.

3. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke kantor Pelayanan Pajak dimana pemotong pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (www.pajak.go.id).

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 25

2.7.1 Pengertian PPh Pasal 25

Dalam PPh pasal 25, wajib pajak membayar pajak pada suatu tahun pajak berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya. Pajak yang dibayar ini bersifat angsuran, dalam arti diangsur setiap masa pajak. Oleh sebab itu PPh pasal 25 biasa disebut sebagai angsuran pajak karena mengatur tentang besarnya pajak yang harus diangsur oleh wajib pajak setiap bulannya (Yolina, 2009: 37).

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong serta pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang boleh dikreditkan dibagi dengan 12 bulan. Pajak penghasilan yang boleh dikurangi dari pajak penghasilan tahun lalu ini hanya pajak penghasilan yang bersifat tidak final, dalam artian pajak yang bersangkutan bisa dikurangkan dari total pajak terutang.

2.7.2 Penghitungan PPh Pasal 25

Besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung dengan rumus berikut:

$$(\text{PPh terutang pada SPT tahun lalu} - \text{PPh Pasal 22,23,24 tahun lalu}) / 12$$

Penggunaan angsuran dengan berdasarkan anggapan bahwa besarnya pajak sama dengan tahun lalu, pada akhir tahun pajak akan disesuaikan kembali dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terjadi untuk tahun yang bersangkutan. Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih besar daripada angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut pajak kurang bayar (PPh Pasal 29). Jika pajak yang terutang sesungguhnya lebih kecil dari angsuran pajak maka selisih yang terjadi disebut pajak lebih bayar (PPh Pasal 28) (Resmi, 2008:127).

2.7.3 PPh Pasal 25 Sebelum Penyampaian SPT

Penghitungan besarnya angsuran pajak biasanya mulai dilakukan pada bulan Maret, karena bulan ini adalah batas penyampaian SPT Masa

Desember PPh, sehingga pada bulan Maret baru diketahui PPh yang terutang tahun sebelumnya, misalnya atas pajak terutang tahun 2001 menurut SPT baru dapat diketahui bulan Maret, maka angsuran pajak untuk bulan Januari dan Februari akan mengikuti angsuran pada bulan Desember tahun sebelumnya atau sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Dirjen Pajak (Resmi, 2008:129).

2.8 Pengertian dan Bahasan Kepatuhan dalam Perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut pengamatan peneliti ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

Upaya-upaya pemerintah di seluruh dunia untuk mengurangi *tax evasion* telah lama diadakan. Untuk Indonesia, pada tahun 1972 melalui SGATAR (*Study Group on Asian Tax Administration and Research*) telah disidangkan di Jakarta dengan salah satu tema utama adalah *Some Aspects of Income Tax Avoidance or Evasion*. Upaya untuk mengurangi *tax evasion*

lebih dini pada tingkat yang lebih mengglobal telah diadakan oleh IFA pada tahun 1980 di Paris dengan tema yang lunak yakni *The Dialogue between the tax administration and the taxpayer up to the filing of the tax return*. Ketidakpatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *tax evasion*.

Wajib pajak dapat juga meminimalkan pembayaran pajak dengan cara penghematan pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah “**tax saving**”. Penghematan pajak ini dapat dilakukan Wajib Pajak dengan cara seperti : tidak membeli produk-produk yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan/kegiatannya sehingga penghasilannya menjadi lebih kecil atau malah tidak dikenakan pajak sama sekali.

Perbedaan antara penghematan pajak (*tax saving*) dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kalau *tax saving* Wajib Pajak memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengenaan pajak, sedangkan pada *tax avoidance* Wajib Pajak memperkecil jumlah utang pajak dengan cara mengeksploitir celah-celah (*loopholes*) yang terdapat pada peraturan perpajakan. Persamaannya adalah kedua cara tersebut, baik *tax saving* maupun *tax avoidance*, tidak dapat dikenakan sanksi perpajakan dari otoritas pajak karena hal itu tidak illegal dan tidak menerobos perundang-undangan perpajakan yang ada, hanya saja agaknya secara moral hal tersebut sangat disayangkan.

Guna memecahkan masalah kepatuhan wajib pajak, beberapa peneliti menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh *tax morale*

(misalnya Feld dan Tyran, 2002 dalam Moh. Nashih 2005). Salah satu temuan penting dalam literatur *tax morale* adalah bahwa fenomena ekonomi seharusnya tidak hanya dianalisis dari sudut pandang tradisional saja melainkan harus juga melibatkan studi tentang *tax morale* sebagai suatu sikap dalam merespon ketidakpatuhan wajib pajak (misalnya Schmolders, 1960 dalam Moh.Nashih 2005).

Eriksen dan Fallan (1996) pernah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pemahaman pajak dan tingkat kriminalitas pajak. Dalam penelitiannya *Eriksen dan Fallan* memfokuskan kriminalitas pajak berupa *tax evasion* (usaha meminimalkan besarnya pajak terutang dengan jalan melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan antara tingkat pengetahuan pajak berbanding terbalik (*negatif*) dengan tingkat kriminalitas pajak dimana jika tingkat pengetahuan perpajakan meningkat, maka tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*) menurun. Artinya, jika tingkat pendidikan meningkat, maka tingkat kepatuhan juga meningkat.

2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Regina Dwi Astuti (2007) melakukan penelitian mengenai analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kota Padang. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 32 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP di kota Padang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di kota Padang

tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun dinilai masih belum maksimal karena hanya mencapai 62,66%.

Tri Rezeki (2009) juga melakukan penelitian mengenai analisis tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun penelitian dilakukan di Kota Solok. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 43 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP dan penghasilannya per tahun di atas PTKP di Kota Solok. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kota Solok tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan, namun dinilai masih rendah yaitu sebesar 69,31%.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu. Sesuai dengan judul, permasalahan yang timbul, pendekatan yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dilakukan di wilayah KPP Pratama Solok. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlokasi di Kota Solok. Jumlah wajib pajak Kota Solok yang memiliki NPWP per 31 Desember 2009 adalah 33.870 orang.

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilannya

Sampel dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Solok yang sudah memiliki NPWP dan mempunyai penghasilan per tahun di atas PTKP.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *metode non-probability sampling* yang berupa *purposive sampling*. *Non-probability sampling* adalah metode pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran, 2006). Sedangkan *purposive sampling* adalah metode pengumpulan informasi dari target-target tertentu, yaitu orang-orang tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti atau karena mereka sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh

peneliti (Sekaran, 2006). Peneliti memakai metode *purposive sampling* dengan alasan agar sampel yang diambil bisa representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria yang penulis maksud untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Memiliki NPWP dengan,
- b) Penghasilan di atas PTKP.

Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan, penelitian ini mengambil sampel dari kuesioner yang dikembalikan oleh responden dengan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada *rules of thumb* yang dikemukakan oleh Roscoe seperti yang dikutip oleh Sekaran (2006) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian adalah $30 < X < 500$. Pada penelitian ini Penulis mengambil sampel sebanyak 60 buah sampel, sehingga memenuhi kriteria jumlah sampel seperti yang dijelaskan oleh Roscoe.

3.3 Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk melakukan pengukuran disebarkan kuesioner kepada responden. Dalam kuesioner, bagian ini akan digambarkan dengan pertanyaan tentang pemahaman responden terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dengan landasan UU KUP No. 28 Tahun 2007 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Bagian ini akan diukur dengan 25 pertanyaan dengan menggunakan skala dikotomi, yaitu

skala yang umumnya digunakan pada subjek dalam penelitian terutama untuk mengukur prestasi dan nilai subjek. Apabila jawabannya benar diberi skor satu dan yang salah diberi skor nol. Tingkat pemahaman digambarkan dari jawaban responden benar atau salah dari pertanyaan yang diberikan. Jumlah skor jawaban merupakan skor pemahaman responden tentang pengetahuan umum pajak penghasilan. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan. Dengan demikian skor tertinggi adalah 25, dengan nilai tengah 12,5. Karena nilai tengah tidak mungkin dicapai, maka apabila skor yang diperoleh di atas nilai tengah dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh kurang dari nilai tengah dikategorikan kurang paham.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diteliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian yang menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner. Daftar pertanyaan kuesioner penulis buat sendiri yang isinya pertanyaan tentang pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sampel.

Wajib Pajak yang terpilih sebagai responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan penelitian (kuesioner) secara langsung pada hari yang bersangkutan dengan tujuan jika ada pertanyaan yang kurang paham dipahami oleh responden, maka peneliti dapat menjelaskan maksud pertanyaan tersebut. Untuk Wajib Pajak yang tidak dapat mengisi langsung pada hari yang bersangkutan, maka akan dihubungi lagi pada hari yang mereka janjikan untuk mengembalikan kuesioner kepada peneliti.

Selain berisikan pertanyaan untuk menguji pemahaman responden, kuesioner juga berisikan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan data lainnya dan dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Bagian pendahuluan

Bagian ini akan digambarkan dengan pertanyaan umum mengenai pekerjaan, tingkat penghasilan, status perkawinan, tanggungan dan pernah atau tidaknya WP mengikuti pelatihan dibidang perpajakan. Bagian ini berisikan 5 buah pertanyaan tentang kondisi atau keadaan responden. Semua pertanyaan ini akan diukur secara langsung dengan menggunakan skala numerik. Jadi tidak ada perbedaan tingkatan antara jawaban yang diberikan oleh responden.

b. Bagian tentang kepatuhan Wajib Pajak

Bagian ini akan digambarkan dengan 5 buah pertanyaan mengenai kepemilikan NPWP responden, dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Skor diberikan sesuai dengan tingkat kepatuhan yang diukur secara langsung. Jadi, jika responden memiliki

NPWP sejak 5 tahun yang lalu dan dalam 5 tahun terakhir hanya memenuhi kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi sebanyak 3 kali, maka kepatuhannya hanya senilai $\frac{3}{5} \times 100\% = 60\%$. Namun, penelitian ini dibatasi hanya untuk melihat kepatuhan WP dalam 5 tahun terakhir.

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum kuesioner ini disebarkan telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dilakukan dengan menyebarkan *pilot study* atau *try out* kuesioner terhadap mahasiswa jurusan akuntansi yang telah mengambil mata kuliah perpajakan dan pajak lanjutan di Universitas Andalas, penulis berasumsi bahwa mereka dan objek penelitian sama-sama memahami tentang peraturan perpajakan.

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang diteliti. Sebelumnya, kuesioner ini telah disebarkan untuk pengujian validitas dan reliabilitas dengan menyebarkan sebanyak 37 kuesioner. Uji ini hanya dilakukan untuk variabel pada bagian II yang berisikan bagian inti untuk mengukur tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan bagi orang pribadi.

Untuk menentukan kevalidan dari item kuesioner ini akan digunakan uji perbedaan 27 % data tertinggi dengan data terendah (Sugiyono,1999) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari rata-rata dan standar deviasi dari 27% data tertinggi dan 27% data terendah dengan rumus sebagai berikut:

$$rata - rata (X) = \frac{\sum x}{n}$$

$$standar deviasi = \frac{\sum(x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

2. Mencari standar deviasi gabungan antara data tertinggi dengan data terendah, dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{gab} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{(n_1 + n_2) - 2}}$$

S_{gab} - standar deviasi gabungan

S_1 = standar deviasi data-data tertinggi

S_2 = standar deviasi data-data terendah

3. Mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{x_1 - x_2}{S_{gab} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

4. Mencari nilai t tabel

T tabel : $df = n_1 + n_2 - 2 ; \alpha = 0,05$

5. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel,

Bila t hitung $>$ daripada t tabel: pertanyaan penelitian adalah valid.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap variabel penelitian didapatkan bahwa variabel tersebut adalah valid.

Dengan cara diatas dapat diketahui validitas variable itu sebagai berikut:

➤ VALIDITAS VARIABEL

17	16	17	17	24	18	18	20	20	22	22	21	23	21	15
14	14	16	13	18	16	20	17	18	14	25	19	20	20	16
15	18	18	20	18	21	16								

Setelah diarray, data menjadi sebagai berikut:

13	14	14	14	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	19	20	20	20	20	20	20	21
21	21	22	22	23	24	25								

1. Mencari rata-rata standar deviasi 27% data tertinggi dan 27% data terendah :

$$0,27 \times 37 = 10 \text{ (yang dihitamkan).}$$

Data tertinggi (D1)

Banyak data tertinggi (n_1) = 10

$$\text{Rata-rata } (x_1) = \frac{\sum x}{n_1} = \frac{13+14+14+14+15+15+16+16+16+16}{10} = \frac{149}{10} = 14,9$$

n_1

10

10

$$\text{Standar Deviasi } (S_1^2) = \frac{\sum (x - x_1)^2}{n_1 - 1} = \frac{10,9}{9} = 1,211$$

Data terendah (D2)

Banyak data terendah (n_2) = 10

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata } (x_2) &= \frac{\sum x}{n_2} = \frac{20+20+21+21+21+22+22+23+24+25}{10} = \frac{219}{10} \\ &= 21,9 \end{aligned}$$

$$\text{Standar Deviasi } (S_2^2) = \frac{\sum (x - x_2)^2}{n_2 - 1} = \frac{24,9}{9} = 2,766$$

2. Mencari Standar Deviasi Gabungan antara data tertinggi dengan data terendah dengan rumus :

$$S_{12} = \frac{\sqrt{(n_1 - 1) s_1^2 + (n_2 - 1) s_2^2}}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$S_{12} = \frac{\sqrt{(10-1) 1,211 + (10-1) 2,766}}{10 + 10 - 2} = \frac{\sqrt{10,899 + 24,894}}{18} = \frac{\sqrt{35,793}}{18}$$

$$S_{12} = 1,410142$$

3. Mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{x_2 - x_1}{S_{12} \sqrt{(1/n_2 + 1/n_1)}}$$

$$t = \frac{21,9 - 14,9}{1,410142 \sqrt{(1/10 + 1/10)}} = \frac{7}{0,54693952}$$

$$t \text{ hitung} = 11,09992883$$

4. Mencari nilai t table :

$$t \text{ table } df \ n_1 + n_2 - 2 = 10 + 10 - 2 = 18$$

$$\alpha = 0,05$$

$$t \text{ table} = 1,734$$

5. Membandingkan t hitung dengan table :

$$t \text{ table} < t \text{ hitung} : \text{pertanyaan valid}$$

$$1,734 < 11,09992883 : \text{pertanyaan variable valid}$$

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah maka didapat kesimpulan bahwa variable yang akan diukur dengan skala dikotomi tersebut dinyatakan valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama yang secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas yang bernilai positif. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik Kuder Richardson karena data berbentuk skor dikotomi (Sugiyono, 1999) dengan rumus sebagai berikut :

$$KR - 20 = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum p(1-p)}{(SD)^2} \right]$$

Dimana:

k = jumlah item dalam setiap instrument atau jumlah butir soal

p = proporsi banyaknya subjek yang menjawab benar pada tiap item

(SD)² : Varian

Namun, untuk variabel ini tidak dilakukan uji reliabilitas karena untuk dapat melakukan uji reliabilitas dengan metode pengujian, dibutuhkan sekurang-kurangnya 2 variabel. Sementara variabel yang diteliti hanya 1.

3.6 Teknik Analisa Data

Data penelitian diolah dengan analisa statistik parametrik, berupa nilai statistik dari tabel frekuensi. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data ini adalah:

1. Melakukan tabulasi dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari kuesioner untuk setiap variabel.
2. menghitung nilai statistik, yaitu tabel rata-rata (mean). Dan nilai tengah (median) untuk masing-masing kelompok variabel. Nilai-nilai statistik ini digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman sampel terhadap variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata ini merupakan hasil perhitungan dengan menjumlahkan skor yang diperoleh oleh seluruh responden kemudian membaginya dengan jumlah responden. Hal ini dijelaskan dengan contoh berikut: Apabila responden mampu menjawab 25 item jawaban dengan benar maka diperoleh skor 25. Jika seluruh responden menjawab benar maka diperoleh total skor dengan menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh yaitu 674 (dari 37 responden). Dengan demikian dapat ditentukan nilai rata-rata adalah dengan membagi total skor tersebut dengan jumlah responden, untuk contoh ini diperoleh nilai rata-rata 25. Artinya paham karena mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan benar. Tingkat pemahaman akan dikategorikan atas kategori paham dan kurang paham. Jika nilai rata-rata yang diperoleh sama atau di atas 12,5 berarti responden paham, kurang dari 12,5 berarti responden kurang paham.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung ke masyarakat Kota Solok yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Sebelum penyebaran kuesioner, peneliti mencari informasi terhadap masyarakat sebagai wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena dalam penelitian ini, wajib pajak yang mempunyai NPWP terpilih sebagai sampel. Peneliti dalam menyebar kuisisioner dengan mendatangi wajib pajak secara langsung. Dalam penelitian ini lamanya waktu yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sampai selesai adalah 15 hari mulai dari tanggal 28 Juni – 12 Juli 2010. Dari keseluruhan kuesioner yang disebar tidak semuanya kembali, dan dari kuesioner yang kembali tersebut tidak semuanya digunakan dalam tahap analisis.

Rincian jumlah kuesioner yang dapat diolah disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Distribusi Kuesioner

Kuesioner disebar	Kuesioner kembali	% Kembali	Kuesioner gugur	Kuesioner dianalisis
55	52	94,5%	7	45

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner

Tabel tersebut menyajikan total kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 55 kuesioner, kuesioner yang kembali sebanyak 52 kuesioner dan yang dianalisis sebanyak 45 kuesioner. Kuesioner yang

gugur sebanyak 7 kuesioner karena disebabkan responden tidak melengkapi data yang diminta.

Roscoe seperti yang dikutip oleh Sekaran (2000) menyatakan bahwa dalam menentukan ukuran sampel ada beberapa aturan, yaitu antara lain: jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian adalah $30 < X < 500$.

4.2 Demografi Responden

Dari seluruh sampel wajib pajak PPh yang telah dikumpulkan, respondennya dapat dideskripsikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Demografi Responden Wajib Pajak PPh

Deskripsi	Wajib Pajak Orang Pribadi PPh	
	Frekuensi	%
Umur		
a) 20-25 tahun	4	9%
b) 26-30 tahun	6	13%
c) 31-40 tahun	17	38%
d) 41-50 tahun	14	31%
e) > 50 tahun	4	9%
Jenis kelamin		
a) Pria	20	44%
b) Wanita	25	56%
Tingkat Pendidikan		
a) S 1	20	44%
b) D 3	8	18%
d) SMU sederajat	17	38%
Status		
a) Kawin	39	87%
b) Belum Kawin	6	13%
Pekerjaan		
a) Pegawai Negeri Sipil	15	33%
b) Pegawai Swasta	15	33%
c) Pedagang	9	20%
d) Wiraswasta	6	14%

Tabel 4.2 (lanjutan)
Demografi Responden Wajib Pajak PPh OP

Deskripsi	Wajib Pajak Orang Pribadi PPh	
	Frekuensi	%
Jumlah Penghasilan		
a) < Rp 1.000.000	7	16%
b) Rp 1.000.000-Rp 2.000.000	16	36%
c) Rp 2.000.000-Rp 3.000.000	10	22%
d) Rp 3.000.000-Rp 5.000.000	8	18%
e) > Rp 5.000.000	4	9%
Jumlah Tanggungan		
a) Tanggungan 0	6	13%
b) Tanggungan 1	4	9%
c) Tanggungan 2	4	9%
d) Tanggungan 3	8	18%
e) Tanggungan > 3	23	51%
Sosialisasi Perpajakan		
a) Pernah	6	13%
b) Tidak Pernah	39	87%

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner

Dari tabel di atas dapat disimpulkan secara garis besar bahwa keadaan ekonomi di Kota Solok relatif bagus terlihat penghasilan bersih yang diperoleh responden rata-rata per bulannya paling tinggi berkisar antara Rp1.000.000 – Rp 2.000.000 dengan skor 36 %, skor 22% penghasilan yang diperoleh sebesar Rp 2.000.000 – Rp 3.000.000, skor 18% penghasilan yang diperoleh sebesar Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 dan skor 9% untuk penghasilan diatas Rp 5.000.000 . Dan ini membuktikan bahwa di Kota Solok berpotensi cukup tinggi terhadap penerimaan pajaknya Dan dilihat dari sisi sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP Pratama Solok banyak dari responden tidak pernah mengikuti sosialisasi perpajakan

terlihat sebesar 87% dan 13 % dari semua responden yang ada mengikuti sosialisasi tentang perpajakan.

4.3 Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III, pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan landasan UU KUP No 28/2007 dan UU PPh No 36/2008 tentang pengetahuan umum pajak penghasilan, prosedur pelaksanaan kewajiban pajak, dan prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan.

Pada penelitian ini, tingkat pemahaman wajib pajak dikelompokkan atas dua kategori, yaitu paham dan kurang paham. Responden yang mampu menjawab dengan benar tepat 50% atau lebih dari total jawaban untuk setiap variabel, termasuk dalam kategori “paham”. Sedangkan responden yang menjawab dengan benar kurang dari 50% pertanyaan dikategorikan “kurang paham”. Hasil pengolahan data dijelaskan sebagai berikut

Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi Responden yang memperoleh skor 13 atau lebih dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor 12 atau kurang dari 12, dikategorikan kurang paham. Hal ini dikarenakan instrumen penelitian yang berupa kuesioner berisikan 25 pertanyaan, sehingga nilai tengah yaitu 12,5 tidak akan bisa dicapai. Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman WP OP terhadap pengetahuan umum PPh disajikan pada tabel 4.3 berikut ini

Tabel 4.3

Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

Keterangan	Wajib Pajak	
	Frekuensi	%
Paham	11	24
Kurang paham	34	76
Total	45	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden wajib pajak PPh, yang mampu menjawab dengan benar sebesar 24% dengan penilaian jawaban diatas nilai tengah atau diatas 12,5 dan 76% responden menjawab pertanyaan dibawah kriteria yang ditentukan dengan penilaian jawaban responden dibawah nilai tengah atau dibawah 12,5.

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, dapat dilihat persentase pemahaman responden untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel pemahaman wajib pajak terhadap pengetahuan umum perpajakan pada tabel berikut ini:

Table 4.4

Persentase Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan

Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Item Pertanyaan	% pertanyaan
1	Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP bagi WP OP	62%
2	Pemahaman mengenai besarnya kewajiban menyampaikan SPT jika nihil	62%
3	Pemahaman mengenai pemotongan waktu PPh 21 pegawai tetap	87%
4	Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia	22%
5	Pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia	2%
6	Pemahaman mengenai PTKP yang berlaku saat ini	22%
7	Pemahaman mengenai jumlah maksimum tanggungan yang diperbolehkan	18%
8	Pemahaman mengenai kepemilikan NPWP jika suami istri sama-sama bekerja	11%
9	Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP	20%
10	Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP	42%
11	Pemahaman mengenai anggota keluarga yang dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menghitung PTKP	13%
12	Pemahaman mengenai pemotongan pajak untuk penghasilan yang diberikan pemberi kerja	69%
13	Pemahaman mengenai batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh OP	44%
14	Pemahaman mengenai tanda tangan di SPT	20%
15	Pemahaman mengenai tarif PPh OP yang berlaku saat ini	44%
16	Pemahaman mengenai tarif PPh OP yang berlaku saat ini	20%
17	Pemahaman mengenai penyetoran PPh kurang bayar akhir tahun	13%
18	Pemahaman mengenai tempat pembayaran atau perlunasan PPh terhutang	7%
19	Pemahaman mengenai sanksi kenaikan jika tidak memiliki NPWP	27%

Table 4.4 (Lanjutan)

Persentase Distribusi Pemahaman Kewajiban Perpajakan

Wajib Pajak Orang Pribadi

20	Pemahaman mengenai sanksi dalam SKP dan atau STP	18%
21	Pemahaman mengenai media untuk penyetoran pajak	36%
22	Pemahaman mengenai penggabungan SPT OP dengan SPT badan	53%
23	Pemahaman mengenai perhitungan pajak saat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah	73%
24	Pemahaman mengenai kelebihan dalam penyetoran pajak	58%
25	Pemahaman mengenai pengenaan pajak kepada pejabat tinggi negara	98%
	Rata - rata persentase	38%

Sumber: Hasil pengolahan data

Dari data tabel diatas, dapat dilihat bahwa responden menjawab dengan benar kurang dari 50%, ini artinya responden dianggap masih kurang paham, dan persentase pemahaman wajib pajak PPh yang memiliki angka paling kecil ada pada pemahaman mengenai kewajiban memiliki NPWP berdasarkan usia seseorang dan tempat pembayaran pajak. Sehingga ini membuktikan bahwa mereka kurang paham terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Jika mereka mengetahui syarat-syarat seseorang boleh memiliki NPWP dan mengetahui tempat pembayaran pajak tentu tingkat kesadaran mereka untuk memiliki NPWP dan membayar pajak akan meningkat.

Dan untuk mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman responden terhadap pengetahuan umum PPh OP dapat diketahui dari perhitungan nilai rata-rata (mean) atas keseluruhan jawaban yang

diberikan oleh responden seperti yang disajikan dalam tabel 4.5 berikut ini:

4.4 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penyampaian SPT tahunan PPh Orang pribadi

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Deskripsi	F	%
Memiliki NPWP	45	100
Kepatuhan menyampaikan SPT		
a) Patuh	36	80
b) Tidak Patuh	9	20

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, dari tabel 4.6 diketahui seluruh (100%) responden sudah memiliki NPWP. Dari 45 orang responden yang diteliti, juga dijelaskan 80% responden sudah patuh untuk menyampaikan SPT sedangkan yang tidak patuh adalah sebesar 20%. Persentase kepatuhan ini dihitung dengan membandingkan berapa kali mereka menyampaikan SPT sejak mereka memiliki NPWP.

Walaupun Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Solok dikategorikan kurang paham,tetapi jika dilihat sekilas dari segi kepatuhannya dalam kewajiban perpajakan terlihat lebih dari setengah responden patuh terhadap kewajiban perpajakan dalam membayar dan melaporkan SPT Tahunannya. Hal ini,mungkin bisa disebabkan ada pihak ketiga yang membantu responden dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Misalnya, dalam menghitung pajak yang dikenakan untuk mereka dengan memakai konsultan pajak dan bisa juga dikarenakan pajak yang mereka

bayar telah dipotong langsung oleh pemberi kerja bagi pegawai negeri sipil, sehingga mereka tidak peduli lagi dengan pemahaman peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini tidak signifikan dengan penelitian terdahulu. Baik penelitian yang dilakukan oleh Astuti di Kota Padang dan juga oleh Tri Rezki di Kota Solok yang mana mereka meneliti tentang pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang hasil penelitiannya membuktikan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di kota tersebut paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan karena pada penelitian ini penulis memakai peraturan undang-undang perpajakan yang berbeda dan dengan kuesioner yang berbeda dengan yang terdahulunya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian tentang analisis tingkat pemahaman kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di Kota Solok, dengan cara mengambil sampel sebanyak 45 responden yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP, dengan cara membagikan kuesioner kepada para responden.

Dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang kewajiban perpajakan wajib pajak orang pribadi dengan segala aspek yang terangkum didalamnya dalam gambaran umum berdasarkan kepada UU KUP No.27 Tahun 2007 dan UU PPh No.36 Tahun 2008

Secara umum bahwasanya tingkat pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Solok sebesar 38% kurang paham terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun Wajib Pajak patuh membayar pajak dan menyampaikan SPT. Tapi Wajib Pajak memahami peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat dari setiap item pertanyaan, ada beberapa item pertanyaan yang responden kurang paham diantaranya:

1. Wajibkah kita memiliki NPWP bila telah telah berumur 21 tahun ?
2. Apakah anak dibawah 17 tahun boleh memiliki NPWP ?
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi dengan status TK/0 yang berlaku saat ini adalah sebesar:

4. Berapakah jumlah maksimal tanggungan yang dibolehkan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ?
5. Jika suami istri sama-sama bekerja dan si suami telah memiliki NPWP, apakah si istri juga harus memiliki NPWP sendiri?
6. Apakah anak tiri dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
7. Apakah adik atau keponakan kandung, dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
8. Apakah mertua dan orang tua kandung dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
9. Batas Waktu paling lambat untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah :
10. Apakah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi boleh ditandatangani oleh orang lain selain Wajib Pajak yang bersangkutan?
11. Berapakah tarif PPh yang dikenakan untuk Penghasilan Kena Pajak diatas 50.000.000 s/d 250.000.000 ?
12. Berapakah tarif PPh tertinggi untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berlaku saat ini ?
13. PPh kurang bayar yang terdapat di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, harus dilunasi paling lambat :
14. Dimanakah tempat membayar pajak ?
15. Berapakah besarnya kenaikan tarif pajak yang akan dikenakan oleh pemotong PPh Pasal 21 bila Wajib Pajak orang pribadi tidak memiliki NPWP ?

16. Berapakah sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak bila terlambat menyetor pajak yang terutang?
17. Media yang digunakan untuk menyetorkan pajak dan sekaligus dapat digunakan sebagai bukti pembayaran pajak adalah :

Dengan melihat hasil analisa data dan item- item pertanyaan yang sangat kurang paham bagi responden, tampaknya ini disebabkan karena responden di Kota Solok selama ini dalam pelaksanaan perpajakannya kemungkinan mereka memakai pihak ke tiga dan pajak mereka talah dipotong langsung oleh pemungut pajak. Padahal untuk saat sekarang system pemungutan pajak penghasilan menganut *self assessment system* yang memberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak agar lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai perubahan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak lebih paham terhadap peraturan pelaksanaan perpajakan. Karena dari hasil penelitian didapatkan fakta bahwa pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan masih rendah,

Dan juga setiap Wajib Pajak untuk dapat meningkatkan lagi pemahamannya terhadap KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) dan PPh (Pajak Penghasilan) tidak hanya melalui ikut dalam pelatihan dan khusus

tentang perpajakan tapi juga bisa juga dengan cara lain seperti mempelajari peraturan yang berlaku melalui *browsing* atau buku-buku peraturan perpajakan yang berlaku sehingga pada akhirnya juga meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagian warga negara untuk menyetor dan melunasi pajak penghasilannya.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dengan tema yang sama, tetapi dengan metoda yang lebih kompleks.

5.3 Keterbatasan Penelitian Dan Saran

Pada penelitian ini, penulis hanya menganalisis pemahaman Wajib pajak Orang Pribadi terhadap peraturan perpajakan saja. Sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak responden dan memperpanjang waktu penelitian sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat untuk menganalisis,serta mengembangkan variabel pemahaman kewajiban perpajakan WP orang pribadi ini dengan variabel lainnya Dan juga hasil dari analisa hanya membagi tingkat pemahaman menjadi paham dan kurang paham untuk skala kurang paham < 50% dan paham > 50%,untuk penelitian selanjutnya hasil analisa agar bisa dikelompokkan menjadi tidak paham, kurang paham, paham dan sangat paham. Sehingga range yang lebih sempit membuat hasil yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Regina Dwi. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2008. *Persandingan Susunan dalam Satu Naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Facrur, Rozie M. 2005. *Hubungan Antara Pemeriksaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh pasal 25 Dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya*.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Komalasari, Puput Tri, dkk (2004), *Degree Of Taxpayer Compliance And Tax Tariff The Testing On The Impact Of Income Types*. Seminar Nasional Akuntansi VIII Solo, 15-16 September 2005: 554-564
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Cetakan Kedua (Edisi Revisi). Jakarta: PT Grasindo.
- Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 Republik Indonesia: 2010.
- Razman Abdul Latif, Ahmed, dkk (2005), *Tax Literacy Rate Among Taxpayers: Evidence from Malaysia*. JAAI Volume 9 NO.1, Juni 2005: 1-13
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Riduan, Drs.MBA. 2006. *Rumus dan Data Dalam Aplikasi Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV.Alfabeta : Bandung.
- Rizal Palil, Moh (2003), *Taxpayer knowledge :A Descriptive Evidence On Demographic Factors In Malaysia*. Jurnal Akuntansi & Keuangan, vol. 7, NO.1, Mei 2005: 11-21
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Setyowati, Lilis (2002), *Rekayasa AkruaI untuk Meminimalkan Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, vol.5, No.3, September 2002: 325-340

Tri Rezeki Putra.2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Solok*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Waluyo, Drs,Msc,MM,Akt, Wirawan. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

KUESIONER PENELITIAN

“ANALISIS PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI dikota SOLOK”. (Menurut UU KUP no.28 tahun 2007 dan UU PPh no.36 tahun 2008)

Kuisisioner ini semata-mata digunakan untuk penelitian tentang pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini akan digeneralisasi, karena itu identitas responden tidak dimuat dalam laporan penelitian.

Identitas Responden

Instansi :
Umur :
Jenis Kelamin :
Tingkat pendidikan :

Petunjuk pengisian

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) dari setiap pertanyaan di bawah ini.

A. BAGIAN PENDAHULUAN

1. Apakah Pekerjaan anda saat ini?
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Karyawan swasta
 - c. Pedagang
 - d. Wiraswasta
 - e. Buruh
 - f.
2. Berapa jumlah penghasilan bersih anda perbulan?
 - a. < Rp 1.000.000,00
 - b. Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00
 - c. Rp 2.000.000,00 – Rp 3.000.000,00
 - d. Rp 3.000.000,00 – Rp 5.000.000,00
 - e. > Rp 5.000.000,00

3. Status perkawinan?
 - a. Kawin
 - b. Tidak kawin
4. Berapa jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan anda: sepenuhnya.
Total berjumlah.....orang.
5. Apakah anda pernah mengikuti kursus atau pelatihan perpajakan ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah

B. BAGIAN INTI

Petunjuk pengisian :

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) dari setiap pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pemahaman anda.

I. Pemahaman Terhadap Ketentuan Umum Perpajakan

1. Bolehkan wajib pajak memiliki NPWP lebih dari 1(satu) ?
 - a. Tidak boleh
 - b. Boleh, bila usahanya atau sumber penghasilannya lebih dari 1 (satu).
 - c. Tidak tahu
 - d. Ragu-ragu
2. Haruskah Wajib Pajak mengisi dan menyampaikan SPT tahunan PPh bil: Pajak Terutangnya untuk suatu tahun pajak tidak ada atau nihil ?
 - a. Tidak harus diisi dan disampaikan.
 - b. Tetap harus diisi dan disampaikan.
 - c. Tidak tahu
 - d. Ragu-ragu
3. Kapan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap dilakukan oleh pemberi kerja atau bendaharawan ?
 - a. Setiap bulan
 - b. Setiap akhir tahun
 - c. Sekali 3 bulan
 - d. Setiap awal tahun
4. Wajibkah kita memiliki NPWP bila telah telah berumur 21 tahun ?
 - a. Wajib.
 - b. Tidak wajib.
 - c. Tidak tahu
 - d. Ragu-ragu

5. Apakah anak dibawah 17 tahun boleh memiliki NPWP ?
 - a. Boleh
 - b. Tidak boleh
 - c. Tidak tahu
 - d. Ragu-ragu
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi dengan status TK/0 yang berlaku saat ini adalah sebesar :
 - a. Rp 13.200.000
 - b. Rp 15.840.000
 - c. Rp 10.000.000
 - d. Rp 25.000.000
7. Berapakah jumlah maksimal tanggungan yang dibolehkan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ?
 - a. 4 orang
 - b. 3 orang
 - c. 2 orang
 - d. 1 orang
8. Jika suami istri sama-sama bekerja dan si suami telah memiliki NPWP, apakah si istri juga harus memiliki NPWP sendiri?
 - a. Harus
 - b. Tidak harus
 - c. Tidak tahu
 - d. Ragu-ragu
9. Apakah anak tiri dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
 - a. Dapat
 - b. Tidak Dapat.
 - c. Tidak tahu
 - d. Ragu-ragu
10. Apakah adik atau keponakan kandung, dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
 - a. Dapat
 - b. Tidak dapat
 - c. Tidak tahu
 - d. Ragu-ragu
11. Apakah mertua dan orang tua kandung dapat dimasukkan sebagai tanggungan untuk menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
 - a. Dapat
 - b. Tidak dapat
 - c. Tidak tahu
 - d. Ragu-ragu
12. Apakah yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ketika penghasilannya dipotong pajak oleh pemberi kerja adalah :
 - a. Minta bukti potong
 - b. Minta bukti transaksi
 - c. Minta kwitansi
 - d. Minta tidak dipotong pajaknya
13. Batas Waktu paling lambat untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah :
 - a. Tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya
 - b. Tanggal 30 April tahun takwim berikutnya
 - c. Tanggal 31 Desember tahun takwim berikutnya
 - d. Tanggal 31 Desember tahun ini
14. Apakah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi boleh ditandatangani oleh orang lain selain Wajib Pajak yang bersangkutan?
 - a. Tidak boleh
 - b. Boleh dengan surat kuasa
 - c. Boleh dengan surat kuasa khusus
 - d. Boleh tanpa surat kuasa
15. Berapakah tarif PPh yang dikenakan untuk Penghasilan Kena Pajak di atas 50.000.000 s/d 250.000.000 ?
 - a. 5 %
 - b. 10 %
 - c. 15 %
 - d. 25 %
16. Berapakah tarif PPh tertinggi untuk Wajib Pajak orang pribadi yang berlaku saat ini ?
 - a. 15 %
 - b. 20 %
 - c. 25 %
 - d. 30 %
17. PPh kurang bayar yang terdapat di dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, harus dilunasi paling lambat :
 - a. Tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya
 - b. Tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya
 - c. Tanggal 31 Desember tahun takwim berikutnya
 - d. Tanggal 31 Desember tahun berjalan
18. Dimanakah tempat membayar pajak ?
 - a. Di Kantor Pelayanan Pajak
 - b. Di Kantor Pos
 - c. Di semua bank
 - d. Di Koperasi
19. Berapakah besarnya kenaikan tarif pajak yang akan dikenakan oleh pemotong PPh Pasal 21 bila Wajib Pajak orang pribadi tidak memiliki NPWP ?
 - a. 10 % lebih tinggi
 - b. 20 % lebih tinggi
 - c. 50 % lebih tinggi
 - d. 100 % lebih tinggi

20. Berapakah sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak bila terlambat menyetor pajak yang terutang?
- Tidak ada
 - 2 % perbulan dari jumlah pajak kurang bayar
 - 2 % perbulan dari jumlah pajak terutang keseluruhan
 - 100% dari jumlah pajak terutang keseluruhan
21. Media yang digunakan untuk menyetorkan pajak dan sekaligus dapat digunakan sebagai bukti pembayaran pajak adalah :
- SPT
 - SSP
 - SPP
 - SKP
22. Apakah SPT Tahunan PPh Pribadi Direktur sebuah CV yang merangkap sebagai pemilik dapat digabung dengan SPT Tahunan PPh CVnya tersebut?
- Boleh
 - Tidak boleh
 - Tidak tahu
 - Ragu-ragu
23. Bila seorang Wajib Pajak bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, siapakah yang memotong atau memungut PPh yang dikenakan atas transaksi tersebut?
- Wajib Pajak
 - Bendaharawan
 - Pihak lain
 - Tidak ada PPh yang dipotong/dipungut
24. Apakah kelebihan pembayaran pajak dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak?
- Dapat
 - Tidak dapat, karena uang yang telah masuk ke kas negara tidak dapat ditarik kembali
 - Tidak tahu
 - Ragu-ragu
25. Apakah presiden dan Pejabat Negara lainnya juga harus membayar pajak?
- Ya
 - Tidak
 - Tidak tahu
 - Ragu-ragu

II. Bagian kepatuhan wajib pajak

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) dari setiap pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah anda memiliki NPWP ?
- Ya
 - Tidak
2. Sejak tahun berapa anda memiliki NPWP ?
- 2005
 - 2006
 - 2007
 - 2008
 - 2009
 - Sebelum tahun 2005
3. Apakah anda telah melunasi kewajiban PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009?
- Sudah
 - Belum
4. Apakah anda telah melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009?
- Sudah
 - Belum
5. Dalam 5 tahun terakhir, berapa kali anda menyampaikan SPT tahunan PPh Orang Pribadi?
- 5 kali
 - 4 kali
 - 3 kali
 - 2 kali
 - 1 kali
 - Tidak pernah

Kritik dan saran anda terhadap Direktorat Jenderal Pajak :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

No :

No Responden	BAGIAN I Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Ketentuan Umum Perpajakan																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Sum	Rata2	Bet ul	Sala h	P	Q	P.Q	
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	11	0	11	14	0,44	0,47	0,21	
2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	10	0	10	15	0,40	0,50	0,20	
3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	11	0	11	14	0,44	0,47	0,21	
4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	20	0,20	0,67	0,13	
5	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	10	0	10	15	0,40	0,50	0,20	
6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	0	5	20	0,20	0,67	0,13
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	0	8	17	0,32	0,57	0,18
8	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	0	7	18	0,28	0,60	0,17
9	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	0	9	16	0,36	0,53	0,19	
10	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	11	0	11	14	0,44	0,47	0,21	
11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	0	7	18	0,28	0,60	0,17	
12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	0	6	19	0,24	0,63	0,15
13	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	0	6	19	0,24	0,63	0,15
14	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	9	0	9	16	0,36	0,53	0,19	
15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	7	0	7	18	0,28	0,60	0,17
16	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	16	1	16	9	0,64	0,30	0,19	
17	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	15	1	15	10	0,60	0,33	0,20	
18	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	13	1	13	12	0,52	0,40	0,21	
19	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	9	0	9	16	0,36	0,53	0,19
20	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	17	1	17	8	0,68	0,27	0,18	
21	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	0	8	17	0,32	0,57	0,18	
22	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	13	1	13	12	0,52	0,40	0,21	
23	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1		1	1	14	1	14	11	0,56	0,37	0,21	
24	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	16	1	16	9	0,64	0,30	0,19	
25	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	18	1	18	7	0,72	0,23	0,17	
26	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	17	1	17	8	0,68	0,27	0,18	
27	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	9	0	9	16	0,36	0,53	0,19	
28	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	9	0	9	16	0,36	0,53	0,19	
29	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	8	0	8	17	0,32	0,57	0,18	
30	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	12	0	12	13	0,48	0,43	0,21	
31	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	6	0	6	19	0,24	0,63	0,15	
32	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	9	0	9	16	0,36	0,53	0,19	
33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	22	0,12	0,73	0,09	
34	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	10	0	10	15	0,40	0,50	0,20	
35	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	14	1	14	11	0,56	0,37	0,21	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	24	0,04	0,80	0,03	
37	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	23	0,08	0,77	0,06	
38	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	8	0	8	17	0,32	0,57	0,18	
39	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	0	7	18	0,28	0,60	0,17	
40	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	0	9	16	0,36	0,53	0,19	
41	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	10	0	10	15	0,40	0,50	0,20	
42	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	23	0,08	0,77	0,06	
43	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	14	1	14	11	0,56	0,37	0,21	
44	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	7	18	0,28	0,60	0,17	
45	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	21	0,16	0,70	0,11	
Sum	28	28	39	10	1	10	8	5	9	19	6	31	20	9	20	9	6	3	12	8	16	24	33	26	42	422	11	422	703	16,88	23,4	7,76	
Persentase	62%	62%	87%	22%	2%	22%	18%	11%	20%	42%	13%	69%	44%	20%	44%	20%	13%	7%	27%	18%	36%	53%	73%	58%	93%	38%							

No Responden	Bagian II : kepatuhan					Persentase kepatuhan	Rata - rata Tingkat
	1	2	3	4	5		
1	1	6	2	2	6	100%	1
2	1	2	2	2	1	50%	1
3	1	1	1	1	0	0%	0
4	1	3	2	2	3	100%	1
5	1	3	2	3	3	100%	1
6	1	1	2	2	1	100%	1
7	1	4	2	2	3	75%	1
8	1	1	2	2	1	100%	1
9	1	1	2	2	1	100%	1
10	1	1	2	2	1	100%	1
11	1	3	2	2	3	100%	1
12	1	2	2	2	0	0%	0
13	1	2	2	2	2	100%	1
14	1	1	1	1	0	0%	0
15	1	2	2	2	2	100%	1
16	1	3	2	2	3	100%	1
17	1	3	2	2	3	100%	1
18	1	2	2	2	2	100%	1
19	1	2	2	2	2	100%	1
20	1	2	2	2	2	100%	1
21	1	4	2	2	1	25%	0
22	1	2	2	2	2	100%	0
23	1	2	2	2	2	100%	1
24	1	2	2	2	2	100%	1
25	1	2	2	2	2	100%	1
26	1	1	2	2	1	100%	1
27	1	2	2	2	2	100%	1
28	1	2	2	2	2	100%	1
29	1	3	2	2	3	100%	1
30	1	2	2	2	2	100%	1
31	1	6	2	2	5	83%	1
32	1	6	2	2	5	83%	1
33	1	1	1	1	0	0%	0
34	1	1	2	2	1	100%	1
35	1	2	2	2	2	100%	1
36	1	3	2	2	3	100%	1
37	1	6	1	1	2	33%	0
38	1	2	2	2	0	0%	0
39	1	2	1	1	0	0%	0
40	1	2	2	2	2	100%	1
41	1	3	2	2	3	100%	1
42	1	6	2	2	5	83%	1
43	1	4	2	2	4	100%	1
44	1	3	2	2	3	100%	1
45	1	2	2	2	2	100%	1
Sum		116	85	86	95	3633%	36
Persentase						81%	